

23

**PENGARUH KOMPETENSI, PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI,
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN (Studi pada Satker Vertikal Kementerian Kesehatan Wil Prov.
DKI Jakarta)**

Muhamad Nur Ihwan¹, Tri Widyastuti², Widarto Rachbini³
Dosen Universitas Pancasila
(Naskah diterima: 10 April 2018, disetujui: 30 April 2018)

Abstract

This research is to examine obtain empirical evidence related the factors that influence government financial statement quality. Based on PP No. 71 year 2010, government financial statement quality have to meet the qualitative characteristic, where are factors that influence are competency, accounting intern control and information technology. The study was conducted on the staf who responsibility doing the accounting in the office that unit of ministry of healthy in Jakarta City, using primary data obtained from questionnaires distributed to respondents. Sampling through purposive sampling and obtained of 51 respondents. The collected data was processed using SPSS version 21 and the statistic method used to analize was multiple linier regression.the data analysis results showed all of research instruments are valid, reliable and feasible model used to explain the dependent variable. The results showed that the competency,accounting intern control and information technology have signifikan positive impact on quality of financial statement.

Keywords: *Government financial statement, competency, accounting intern control, and information technology.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendapatkan bukti secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 bahwa laporan keuangan pemerintah memiliki karakteristik kualitatif, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kompetensi, pengendalian intern akuntansi dan teknologi informasi. Penelitian dilaksanakan pada petugas SAI di satuan kerja vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden. Penentuan sampel melalui purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 51 responden. Data yang tersedia diproses menggunakan SPSS versi 21 dan di analisa menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil uji analisa data menunjukkan hasil semua instrumen penelitian valid dan reliabel serta model yang digunakan layak untuk menjelaskan variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, pengendalian intern akuntansi dan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Laporan Keuangan Pemerintah, kompetensi, pengendalian intern akuntansi dan teknologi informasi.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini telah meningkatkan tuntutan terhadap akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana upaya konkrit untuk mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dan mempublikasikannya kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah pusat/daerah sebagai dasar

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Untuk mengetahui kualitas Laporan keuangan pemerintah, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah. Dimana BPK akan mengeluarkan opini terhadap Laporan Keuangan yang telah diperiksanya sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, jumlah kementerian lembaga yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Unqualified Opinion) dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan yang signifikan dalam hal pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah tabulasi perkembangan opini LKKL :

Tabel.1.

Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006 s.d 2013

Tahun LK	OPINI								Total LKKL
	WTP		WDP		Adverse		Disclaimer		
2006	7	8,0%	36	46%	0	0%	36	46%	79
2007	15	19%	31	39%	1	1%	33	41%	80
2008	34	41%	31	37%	0	0%	18	22%	83
2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78
2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83
2011	66	77%	18	21%	0	0%	3	2%	87
2012	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92
2013	64	74%	19	22%	0	0%	3	4%	86

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 BPK

Berdasarkan tabel.1 pada periode 2006 sampai dengan 2013 kualitas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2011 dan pada tahun 2012 mengalami penurunan kembali. Hal tersebut ditunjukkan antara lain dengan peningkatan persentase LKKL yang memperoleh opini WTP (jumlah opini WTP dibandingkan dengan total LKKL pada tahun yang sama) yaitu dari 8% pada tahun 2006 menjadi 77% pada tahun 2011 atau meningkat sebanyak 69% namun menurun pada tahun 2012 menjadi 74%.

Di samping peningkatan opini WTP, perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan juga terlihat dari penurunan jumlah persentase opini WDP, TW dan TMP pada

periode tahun yang sama. Kecenderungan peningkatan persentase opini WTP dan penurunan persentase opini selain WTP ini menggambarkan peningkatan keandalan data dan informasi yang disajikan di LKKL dan upaya optimal yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga (KL) dalam memperbaiki penyajian laporan keuangan termasuk melaksanakan rekomendasi BPK.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dimana perbedaan mendasarnya adalah dari semula penggunaan basis akuntansi Kas Menuju Akrua (*Cash toward Accrual*) menjadi Basis Akuntansi Akrua, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2003. Sesuai dengan komitmen pemerintah dengan DPR bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan paling lambat adalah tahun 2015.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan bagi pemerintah pusat atau daerah dalam implementasi akuntansi berbasis Akrual tersebut, di antaranya: Pertama, Kompleksitas dan jumlah transaksi yang harus dicatat dalam akuntansi semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat dan transparansi. Prinsip dan kebijakan akuntansi yang dilibatkan dalam proses penyusunan laporan akan semakin bervariasi. Kedua, Kompetensi SDM yang terlibat dalam akuntansi tidak merata. Ketiga, Sistem Informasi Akuntansi yang masih dalam tahap pengembangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap kualitas laporan keuangan dilingkungan satuan kerja vertikal Kementerian Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dengan judul Pengaruh Kompetensi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan satuan kerja

Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

II. KAJIAN TEORI

1) Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori ini menjelaskan konsep hubungan kontraktual antara pemberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agency*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerjasama yang disebut “*nexus of contract*”. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. (Jensen dan Meckling, 1984, dalam Kawatu, 2009).

2) Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi kepatuhan seorang individu. Menurut Teyler dalam Faristina (2011) terdapat dua perspektif dasar dalam *literature* sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut *instrumental* dan *normative*. Perspektif *instrumental* mengasumsikan

individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan *penalty* yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

3) Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara / daerah selama satu periode. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, bahwa yang dimaksud dengan Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/D berupa:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan

keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial dan Calk.

a. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan ini menerminkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan dalam satu periode.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Laporan Finansial (Keuangan) terdiri dari :

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

2. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

4) Kompetensi

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*abilty*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Menurut Dunnets dalam anonim, skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan

dan pengalaman. Menurut Blanchard & Thacker (2004) dalam anonim, skill seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengeporasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif atau mengimplentasikan suatu strategi bisnis.

5) Pengendalian Intern Akuntansi

PP Nomor 60 Tahun 2008 mende-finisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain (Wahana Komputer, 2003):

- (a) adanya perlindungan fisik terhadap harta
- (b) pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan
- (c) adanya jejak audit yang baik
- (d) sumber daya manusia yang optimal.

Sedangkan Mahmudi (2007) menye-butkan komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut.

a) Sistem dan prosedur akuntansi.

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP Nomor 58 tahun 2005): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (2) sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas; (3) sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

b) Otorisasi.

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah baik pusat atau daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan pemerintah baik pusat atau daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah pusat atau daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak

yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

c) Formulir, dokumen, dan catatan.

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah pusat atau daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

d) Pemisahan tugas.

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

6) Teknologi Informasi

Teknologi Informasi menurut (Wardiana, 2002) adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data,

termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data disebar dan diakses secara global.

Dampak dari pemanfaatan teknologi ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson *et al.*, 2000):

1. Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,
2. Keakuratan dalam perhitungan dan perbandingan lebih besar,
3. Biaya pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,
4. Penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu,
5. Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,

6. Pilihan pemasukan data dan penyediaan *output* lebih luas/banyak, dan
7. Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.

Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian hardware yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak (Pujonggo, 2004).

A. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Kompetensi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Teknologi Informasi secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, untuk mencapai Kualitas Laporan

keuangan sesuai dengan ketentuan, maka diperlukan kompetensi, pengendalian intern akuntansi dan teknologi informasi, sebaliknya apabila tidak ada kompetensi, pengendalian intern akuntansi dan teknologi informasi maka dapat menyebabkan Kualitas Laporan Keuangan tidak sesuai dengan ketentuan.

H₁ :Terdapat pengaruh signifikan Kompetensi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian Afrianti (2011), Harifan (2007) mengemukakan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan sedangkan menurut Indriasari (2008) bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh

positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H2: Terdapat pengaruh signifikan Kompetensi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. Pengaruh Pengendalian Intern

Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian Santiadji dkk (2010) mengemukakan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, Aristanti dkk (2011) efektifitas sistem akuntansi dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, Tantrianti dkk (2012) juga menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

H3: Terdapat pengaruh signifikan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4. Pengaruh Teknologi Informasi

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Teknologi Informasi secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan, untuk mencapai Kualitas Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan, maka diperlukan

Teknologi Informasi, sebaliknya apabila tidak ada Teknologi Informasi, maka dapat menyebabkan Kualitas Laporan Keuangan tidak sesuai dengan ketentuan.

H4 : Terdapat pengaruh signifikan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

III. METODE PENELITIAN

Untuk penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Data diambil dari hasil kuesioner yang disampaikan secara langsung kepada responden yaitu petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di satuan kerja di bawah UAPPA-W Provinsi DKI Jakarta Kementerian Kesehatan dengan beberapa kepala bagian akuntansi untuk memperdalam informasi.

Populasi adalah sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena (Santoso, 2013). Target Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di satuan kerja di bawah UAPPA-W Provinsi DKI Jakarta Kementerian Kesehatan.

Sampel didefinisikan sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi (Santoso, 2013). Pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Jadi *purposive sampling* ialah metode pengambilan sampel yang digunakan peneliti, jika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu.(Sugiono, 2010).

Adapun kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Petugas SAI yang mengerjakan Sistem Akuntansi Keuangan
2. Petugas yang telah memiliki pengalaman minimal 1 tahun.
3. Petugas SAI yang bertugas menyusun laporan keuangan

Berdasarkan kriteria tersebut, sampel awal penelitian ini ditemukan sebanyak 54 petugas SAI di 20 Satker Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

3.1 Pengolahan Data

Penelitian ini melakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya.

Adapun model persamaan regresi berganda ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

keterangan:

Y = Kualitas laporan keuangan

α = konstanta

$\beta_1\beta_2\beta_3$ = koefisien regresi

x_1 = Kompetensi

x_2 = Pengendalian Intern Akuntansi

x_3 = Teknologi Informasi

e = error term

3.2 Teknik Analisis Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Imam Ghazali, 2009). Uji validitas terhadap kuesioner dilakukan masing-masing item pernyataan yang membentuk variabel tertentu, dalam penelitian saat ini adalah kompetensi, pengendalian intern akuntansi, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk mengukur validitas maka digunakan teknik korelasi *Product Momen Pearson* . Jika hasil korelasi dari *Product Momen Pearson* antar masing-masing item pernyataan dengan skor total pernyataan menunjukkan hasil signifikan (r hitung $> r$ tabel), maka item pernyataan bisa dikatakan valid. Sebaliknya jika (r hitung $< r$ tabel) maka item tidak valid atau dinyatakan gugur.

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghazali, 2009). Metode yang digunakan adalah metode statistik uji *Cronbach Alpha* dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Jika koefisien *Cronbach Alpha* > 0,6 maka dapat dikatakan variabel tersebut reliabel
- b. Jika koefisien *Cronbach Alpha* < 0,6 maka dapat dikatakan variabel tersebut tidak reliabel.

IV. HASIL PENELITIAN

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan variabel kompetensi, pengendalian intern akuntansi dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini berarti dengan adanya kompetensi dari pegawai dalam menyusun laporan keuangan, kemudian adanya pengendalian intern akuntansi yang diterapkan dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait serta didukung oleh penerapan teknologi informasi. Ketiga faktor

ini akan sangat membantu dalam terbentuknya laporan keuangan yang berkualitas pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil Uji t bahwa pengendalian intern akuntansi menunjukkan nilai t hitung tertinggi yaitu sebesar 2,710 yang artinya bahwa pengendalian intern akuntansi lebih dominan dibandingkan dengan kompetensi dan teknologi informasi dalam menentukan kualitas laporan keuangan.

4.2 Pengaruh kompetensi terhadap kualitas laporan keuangan

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial variabel kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kompetensi sumberdaya manusia dan kualitas laporan keuangan mempunyai hubungan positif, semakin baik kompetensi sumberdaya manusia, semakin baik pula kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk memperoleh sumber daya yang kompeten satuan kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir meningkatkan

perekrutan pegawai yang bertugas untuk menyusun laporan keuangan dengan latar belakang pendidikan akuntansi / ekonomi, hal ini dapat dilihat dari profil responden dengan masa kerja dibawah 5 tahun sebanyak 37.3 persen.

Adapun kompetensi pegawai di satuan kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan sub variabel pengetahuan, paling banyak dipengaruhi adanya pelatihan/*workshop* terkait SAI. Hal ini dapat dilihat jawaban responden dimana indikator pernyataan no 5 memiliki r hitung paling tinggi untuk sub variabel pengetahuan.

Pelatihan/*workshop* terkait SAI diadakan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan secara rutin minimal 2 sampai 4 kali dalam setahun dan mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan dan pemahaman peraturan-peraturan keuangan yang terkini sehingga tujuan tersebut diadakan oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mulai dari tingkat satuan kerja, wilayah, eselon 1 dan tingkat kementerian untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Selain dari pengetahuan, kompetensi seorang pegawai juga diperoleh dari pengalaman dalam

penyusunan laporan keuangan, faktor masa kerja dan komunikasi yang efektif. Banyaknya jumlah laporan yang telah disusun oleh pegawai merupakan indikator sub variabel pengalaman yang paling berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di satuan kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Indriasari (2008) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian ini dimungkinkan karena kondisi obyek penelitian, dimana satuan kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi obyek penelitian ini sebagian besar adalah satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dimana tuntutan pertanggungjawaban atas kegiatan operasional yang telah dilakukan tidak hanya dalam bentuk Laporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintah tetapi juga dituntut untuk menyelenggarakan dan melaporkan keuangan secara ala bisnis (*business like*) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Maka satuan kerja harus memiliki pegawai

yang kompeten dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan agar dapat memenuhi tuntutan tersebut.

Namun penelitian ini sesuai dengan penelitian Celviana (2010) yang menyatakan sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Demikian pula Choirunisah (2009) mengemukakan adanya pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan instansi. Andriani (2010) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan daerah.

4.3 Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial variabel pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dimana hasil uji t , pengendalian intern akuntansi mempunyai t hitung sebesar 2,710 dan nilai ini paling tinggi dibandingkan dengan variabel kompetensi dan teknologi informasi.

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa eksistensi pengendalian intern akuntansi dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta sangat baik. Adanya sistem dan prosedur akuntansi yang telah dimiliki oleh satuan kerja mampu menjadi pedoman bagi petugas SAI dalam melaksanakan tugasnya dan pemahaman terhadap fungsi otorisasi sehingga setiap transaksi hanya akan dapat terjadi apabila ada otorisasi dari Kuasa Pengguan Anggaran (KPA) maupun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sehingga dengan adanya sistem dan prosedur akuntansi serta otorisasi setiap transaksi akan dapat memberikan keyakinan bahwa setiap transaksi yang terjadi adalah valid dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini akan mempermudah satuan kerja dalam menghadapi proses audit oleh BPK karena memungkinkan adanya *audit track* atas transaksi yang terjadi.

Selain itu seluruh transaksi yang terjadi harus berdasarkan bukti transaksi yang valid dan sah. Untuk setiap transaksi pengeluaran maka dokumen pendukung harus lengkap dan benar, dimana sebelum terjadi proses pembayaran maka dokumen

pendukung telah diuji dan diperiksa oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PP SPM) dan juga oleh Bendahara Pengeluaran. Hal ini merupakan kendali utama agar setiap transaksi yang terjadi didukung dengan bukti yang valid dan sah sehingga apa yang tersaji dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dan akan sangat penting dalam proses audit keuangan oleh BPK.

Pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi dilakukan secara *up to date* ke dalam aplikasi hal ini akan memudahkan bagi pimpinan untuk mengevaluasi atas pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan secara *realtime* karena laporan keuangannya memberikan informasi yang relevan. Selain hal tersebut apabila transaksi-transaksi tersebut tidak dicatat kedalam aplikasi SAI maka akan berdampak pada saat proses rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Apabila terdapat perbedaan pencatatan antara Satuan Kerja dan KPPN dan hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja maka KPPN akan menunda penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berarti tidak akan ada pembayaran atas transaksi yang terjadi dan akan mengganggu kegiatan

operasional Satuan Kerja tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan transaksi secara *up to date* adalah kebutuhan agar laporan keuangan berkualitas dan juga tuntutan agar kegiatan operasional tetap berjalan lancar.

4.4 Pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial variabel teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Hasil pengujian hipotesis ini dapat memberikan gambaran bahwa para petugas SAI pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta telah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Walaupun jumlah komputer tersedia memenuhi kebutuhan para petugas SAI namun dari sisi perkembangan teknologi masih kurang memadai. Hal ini disebabkan bahwa proses pengadaan komputer harus direncanakan berdasarkan proses anggaran bukan karena adanya perubahan teknologi yang digunakan. Dan ketika terdapat perubahan aplikasi yang baru yang

membutuhkan spesifikasi tertentu tetap menggunakan komputer yang ada, sehingga penggunaan aplikasi yang baru tersebut menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan jawaban responden bahwa dalam proses penyusunan laporan keuangan, rata-rata para petugas SAI menggunakan aplikasi internal maupun aplikasi umum selain menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini karena Satuan Kerja nya adalah Rumah Sakit dan Balai, dimana masing-masing satuan kerja memiliki dan mengembangkan Sistem Informasi Rumah Sakit atau Balai dalam proses pelayanan. Sehingga untuk penyusunan laporan keuangan tidak bisa hanya mengandalkan aplikasi SAI sebagaimana satuan kerja non rumah sakit/balai karena jumlah transaksi yang banyak dan kebutuhan pelaporan yang lebih kompleks.

Dengan adanya aplikasi internal maka akan mampu menghasilkan data yang akurat dan valid sebagai dasar untuk penginputan ke dalam aplikasi SAI dan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan beberapa aplikasi internal maupun aplikasi umum akan mampu

mempercepat pengolahan data dan menjamin keakuratan serta kevalidan data, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas laporan keuangan satuan kerja.

Selain pemanfaatan teknologi, hasil pengujian hipotesis ini juga memberikan gambaran bahwa kecocokan tugas-teknologi informasi yaitu tingkat dimana teknologi membantu pegawai dalam proses penyusunan laporan keuangan juga memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan adanya aplikasi baik internal maupun aplikasi SAI yang menyediakan fitur dan dukungan yang tepat terkait dengan tugas para pegawai dalam menyusun laporan keuangan maka akan meningkatkan kinerja para pegawai tersebut.

Indikator kinerja bagi pegawai yang bertugas menyusun laporan keuangan adalah laporan keuangannya yang berkualitas dimana data yang disajikan akurat lengkap dan relevan untuk dasar pengambilan keputusan oleh para pengguna. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Harifan (2007) dan Indriasari (2008) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya tentang pengaruh kompetensi, pengendalian intern akuntansi, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Secara simultan variabel kompetensi, pengendalian intern akuntansi, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Secara parsial variabel kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hasil temuan ini sejalan dengan Choirunisah (2009) dan Andriani (2010) yang menyimpulkan bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan instansi.

Secara parsial variabel pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Temuan ini sejalan dengan penelitian Santiadji dkk (2010) dan Harifan (2007) pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Secara parsial variabel teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harifan (2007) dan Indriasari (2008) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Wiwik. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Volume 5 Nomor 1.
- Aristanti Widyaningsih, Alvian Triantoro, Lili Sugeng Wiyantoro. 2011. Hubungan Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Blocher Edward J, Chen Kung H, Cokins Gary, Lin Thomas W. 2007. *Manajemen Biaya Penekanan Strategis*, Edisi Tiga. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

- Celviana Widyaningrum, Rahmawati. 2010.
Pengaruh SDM dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi terhadap
Keterandalan dan Ketepatanwaktuan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
dengan Variabel Intervening
Pengendalian Intern Akuntansi, Studi
Empiris di Pemda Subosukawonosraten.
Simposium Nasional Akuntansi XII
Purwokerto.
- Danang Sunyoto. 2011. *Analisis Regresi dan*
Uji Hipotesis, Caps, Yogyakarta.
- Danang Sunyoto, Prosedur. 2012. *Uji*
Hipotesis Untuk Riset Ekonomi.
Alfabeta, Bandung.
- Darno. 2012. *Analisis Pengaruh Kemampuan*
SDM dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi Terhadap Kualitas Laporan
Barang Kuasa Pengguna . Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
([http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/](http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/238)
[article/view/238](http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/238))
- Desi Indriasari. 2008. Pengaruh Kapasitas
Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Pengendalian
Intern Akuntansi Terhadap Nilai
Informasi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah. (*Tesis Politeknik*
Negeri Sriwijaya, Palembang).